

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aan Eko Widiyanto dan Rahmad Syafaat, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemerintahan Desa Dari Desa Terkooptasi dan marginal Menuju Desa Otonom dan Demokratik*, Sekretariat Penguatan otonomi Desa, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya Malang, 2006.
- Abdur Rozaki, *Promosi Otonomi Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2003
- Alan Mountjoy, *Industrialization and Developing Countries*, 1975, atau Schrool, *Modernisasi, pengantar sosiologi pembangunan negara-negara berkembang*, Gramedia, 1981
- Antonius Tarigan, *Mencermati Dampak Kebijakan Publik*. Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektor & Daerah, Kantor Meneg PPN/Bappenas dan Mahasiswa Program Doktor FISIP Universitas Indonesia.
- Ari Dwipayana dan Sutoro Eko (eds.), *Membangun Good Governance di Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2003
- Ari Dwipayana, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Pustaka Pelajar, 2003.
- Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- Budiman, *Penyusunan Konsep Perumusan Pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai-nilai Kemasyarakatan ("social capital") untuk Integrasi Bangsa*, kerjasama FISIPOL UGM dengan Kantor Eks Menteri Negara Masalah-masalah Kemasyarakatan, Yogyakarta, 2001,
- C.F.Strong, *Modern Political Constitution*, revised edition, London: Sidgwick and Jackson, 1952.
- Dewa Gede Atmadja, *Awig-Awig Desa Adat Bali: Suatu Analisis Hukum Tata Negara, Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Edisi Khusus Kumpulan Tulisan dalam rangka Purnabakti Prof. ... dari Rangkuti, S.H., Airlangga University Press, 2008,
- Dibyowibowo, *Prisma*, LP3ES, Jakarta, Januari 1988
- Franz Husken, *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman, sejarah diferensiasi sosial di Jawa, 1830-1980*, Jakarta, Grasindo, 1998

- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang. 2004.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara [General Theory of Law and State]* diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2006
- I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural, Perspektif Antropologi Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2007.
- Immanuel Wallerstein, *the Modern World System*, Academic Press, New York, 1974
- IRE terangkum dalam *Annual Report 2001-2002*, Yogyakarta, IRE Press, 2002
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1993
- Manan, Bagir dan Magnar, K, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung. 1986
- Mari'un, *Azas-azas Ilmu Pemerintahan*, Yogyakarta, FISIP, UGM. 1975.
- Maschab, Mashuri. *Pemerintah Desa di Indonesia. PAU-Studi Sosial. UGM. Jakarta. 2001*
- Miftah, Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003.
- Miftah, Thoha, *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta. 2000
- Miriam, Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. Cetakan Ketiga (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Mohtar Mas' oed, *Ekonomi dan Struktur Politik, orde baru 1966-1971*, Jakarta 1989,
- Mohtar Mas' oed, *Korporatisme dan Birokrasi Desa dalam Politik, Demokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994.
- Muslimin, Amrah, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung. 1986.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2007
- Ndraha, Taliziduhu, *Ilmu Pemerintahan Jilid I*, BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD, Jakarta. 2000.
- Prijono Tjiptoherianto dan Yumiko M. Priyono, *Demokrasi di Pedesaan*, Sinar Harapan dan Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1983

- Putra Fadilah, *Devolusi: Politik Desentralisasi Sebagai Media Rekonsiliasi Ketegangan Politik Antara negara-Rakyat*, Korp PMII Putri- Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
- Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 28 Meni 1945-22 Agustus 1945
- R. Yando Zakaria, *Abih Tandeh*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2000,
- Raharjo, *Perkembangan Kota dan Permasalahannya*, Jakarta, Bina Aksara, 1983
- Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indoneesia*, Indepth Publishing, Bandar Lampung.
- Rust, Bonney, *The Pattern of Government*, London Pitman Paper Books. 1969.
- Ryaas Rasyid, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*, Jakarta,
- Taufik Abdullah, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonsia (BPUPKI)*, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ghalia Indonesia. Jakarta
- Sadu Wasistiono, *Prospek Pengembangan Desa*, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daeran, Fokus Media, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, cetakan kedua Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Siagian, P. Sondang, *Administrasi Pembangunan*, CV. Haji Masagung, Jakarta. 1987.
- Sirajuddin, Didik S., & Winardi, *Hukum Pelayanan Publik yang Berbasis Buktaan Informasi dan Partisipasi*, Malang: Setara Press, 2011
- Soekanto dan Mamoedji, *Penelitian Hukum Normatif*, Radjawali, Jakarta. 1985
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa* Penerbit Sumur, Bandung, 1965.
- Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung. 2006.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid III, Jakarta, Gunung Agung. 1968.
- Waldemar Besson dan Gotthard Jasper, *The Rule of Law and Justice Bind All State Authority*, dalam Josef Thesing (ed), *The Rule of Law*, Sank Augustin:Konrad Adenaue Stiftung, 1997.
- Zen Zanibar M.S., *Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus Pada Desa Di Propinsi Sumatera Selatan*, Disertasi Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1988/1999

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar RI 1945

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1995 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktur di Jajaran Departemen Dalam Negeri.

C. Sumber-sumber lain

Ivan Mubarak. *Implementasi Otonomi Desa Menurut UU 32/2004*.
<http://m.politikana.com/baca/2011/01/27/implementasi-otonomi-desa-menurut-uu-no-32-2004>

Ivan Mubarak, SH. *Implementasi Otonomi Desa Menurut UU 32/2004*.
<http://m.politikana.com/baca/2011/01/27/implementasi-otonomi-desa-menurut-uu-no-32-2004>

Michael Bayles, *Law and Politics*, hlm. 137. Sebagaimana diunduh dari
<http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1014/14.pdf>